



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : AVIRIANTO SURATNO
- Jabatan** : SEKRETARIS BADAN
- NHK** : 180677

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.600.000.000**

- Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **60.000.000**

- MOTOR, NORTON 500 CC SEPEDA MOTOR Tahun 1954, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, MERCEDEZ BENZ E240 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **20.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **458.378.843**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **112.563.235**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **340.188.095**

Sub Total **Rp.** **5.591.130.173**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **5.591.130.173**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **BUMN/BUMD**

LEMBAGA : **PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI**
PENERBANGAN INDONESIA

UNIT KERJA : **WAKIL PIMPINAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AZIZATUN AZHIMAH**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO**
3. NHK : **643842**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.193.640.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
4. Tanah Seluas 2976 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.532.640.000
5. Tanah Seluas 999 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 161.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.450.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTURNER 2.4 FRZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BPXHBD 2.0 Q HV CVT TSS/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS YARIS CROSS GR HYBRID Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.244.765.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.276.562.308
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.058.870.790
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.698.952.992
Sub Total	Rp.	16.922.791.090
III. HUTANG	Rp.	1.083.914.216
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.838.876.874

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDDIET KUS SAM RADITYO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO, ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3. NHK : 198637

II. DATA HARTA

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 4.167.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/373 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/30 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 441.000.000 |
| 1. MOTOR, KTM RC200 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 | | |
| 2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000 | | |
| 3. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000 | | |
| 4. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 137.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 10.000.000 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 215.000.000 |



F. HARTA LAINNYA	Rp.	150.000.000
Sub Total	Rp.	5.120.000.000
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.670.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIO ANGGORO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
3. NHK : 680235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 532.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, MAZDA 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, TOYOTA NF125D Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. 301.618.800

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 521.549.891

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.855.168.691

III. HUTANG Rp. 678.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.177.168.691

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

UNIT KERJA : KANTOR CABANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL ARIFIN HARAHAP
2. Jabatan : GENERAL MANAGER YOGYAKARTA
3. NHK : 730979

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 504.000.000

1. MOBIL, BMW X3 Tahun 2004, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY SUV Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, HOLDEN SEDAN Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 109.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 700.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 760.884.999



Sub Total	Rp.	6.423.884.999
III. HUTANG	Rp.	1.500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.923.884.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.